

## **MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

### **“PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK ”**

#### **Dosen Pengampu:**

1. Dr. Pujiati., S.Pd., M.Pd.
2. Mega Metalia, SE, M.Si., MSAk., Ak.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



#### **Disusun oleh:**

#### **Kelompok 4**

Muhammad Jibril Ramadhan 2313031045

Nela Amelia 2313031050

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta berbagai upaya, tugas makalah mata kuliah Akuntansi Sektor Publik “Penganggaran Sektor Publik” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ibu. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. Selaku dosen pengampu mata kuliah dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-sebaiknya, berdasarkan pengetahuan dan beberapa referensi yang kami ambil, meskipun tidak lengkap.

Di samping itu, apabila dalam makalah ini didapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 20 September 2025

Kelompok 4

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	1
1.3    Tujuan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	3
2.1    Konsep dan Pengertian Anggaran Sektor Publik .....	3
2.2    Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik .....	3
2.3    Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik .....	4
2.4    Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	5
<b>BAB III.....</b>	7
<b>PENUTUP.....</b>	7
3.1    KESIMPULAN.....	7
3.2    SARAN.....	7
<b>STUDI KASUS .....</b>	8
<b>POST TEST .....</b>	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penganggaran sektor publik merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Anggaran sektor publik adalah proses penentuan alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas pemerintah dalam satuan moneter, yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Berbeda dengan sektor swasta yang menjaga anggarannya sebagai informasi rahasia, sektor publik menuntut keterbukaan agar anggaran dapat dikritik, didiskusikan, dan mendapat masukan dari masyarakat.

Penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dapat menggagalkan perencanaan dan tujuan organisasi pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan anggaran sektor publik juga harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan orientasi kinerja untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang optimal. Selain itu, proses penganggaran sektor publik tidak hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan kebijakan fiskal yang membantu pemerintah memenuhi tujuan fiskal, memperkuat koordinasi antar bagian pemerintahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik dan legislatif.

Penganggaran sektor publik telah mengalami perkembangan sesuai tuntutan masyarakat dengan pendekatan manajemen baru (New Public Management), yang menempatkan kinerja sebagai fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penganggaran sektor publik memegang peran strategis dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat luas.

#### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa Yang Dimaksud Konsep Dan Pengertian Anggaran Sektor Publik?
2. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik?
3. Apa Saja Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik?
4. Apa Saja Fungsi Anggaran Sektor Publik?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk Menjelasakan Konsep Dan Pengertian Anggaran Sektor Publik
2. Untuk memahami Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
3. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
4. Untuk Mengetahui Fungsi Anggaran Sektor Publik

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Konsep dan Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Istilah anggaran berasal dari kata *budget* (bahasa Inggris) yang berakar dari kata *bouquette* (bahasa Prancis) yang berarti “sebuah tas kecil”. Dalam pengertian luas, anggaran mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam suatu periode. Sementara itu, dalam arti sempit, anggaran hanya merujuk pada rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. Penganggaran (*budgeting*) sendiri merupakan kegiatan mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk membiayai kebutuhan organisasi yang cenderung tidak terbatas.

Anggaran sektor publik dapat dipahami sebagai rencana kegiatan dan keuangan secara periodik umumnya tahunan yang memuat program, kegiatan, jumlah penerimaan, serta besaran pengeluaran yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.

Secara hakikat, anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan kinerja yang hendak dicapai sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam konteks sektor publik, anggaran berfungsi sebagai alat akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan dana masyarakat dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana publik berjalan dengan baik. Proses penganggaran menjadi krusial karena menyangkut penentuan alokasi dana bagi setiap program dan aktivitas.

Terdapat tiga aspek utama yang harus termuat dalam anggaran sektor publik, yaitu:

- 1) Perencanaan
- 2) Pengendalian
- 3) Akuntabilitas publik.

Secara lebih rinci, anggaran sektor publik menampilkan besaran belanja yang diperlukan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta menjelaskan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan tersebut.

#### **2.2 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan organisasi,

penganggaran mutlak diperlukan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor yang dominan dalam proses penganggaran adalah :

- a. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
- b. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
- d. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.

### **2.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik disusun dengan berlandaskan sejumlah prinsip penting sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislative  
Sebelum pemerintah (eksekutif) dapat menggunakan dana, anggaran wajib memperoleh persetujuan atau pengesahan dari lembaga legislatif.
2. Komprehensif  
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus tercantum secara lengkap dalam anggaran. Keberadaan dana di luar anggaran resmi (*non-budgetair*) tidak sesuai dengan prinsip keterpaduan ini.
3. Keutuhan anggaran

Semua pendapatan dan belanja negara harus dikonsolidasikan dalam satu dana umum (*general fund*), bukan dipisahkan dalam berbagai rekening terpisah.

4. Nondiscretionary Appropriation

Dana yang telah disetujui legislatif harus dimanfaatkan secara hemat, efisien, dan efektif, sesuai jumlah dan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Bersifat Periodik

Anggaran disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan, namun dapat pula mencakup periode lebih dari satu tahun (multitahunan).

6. Akurat

Perkiraan dalam anggaran harus realistik, tanpa cadangan tersembunyi (*hidden reserve*) yang bisa memicu pemborosan, inefisiensi, atau menyebabkan pendapatan diremehkan dan belanja dibesar-besarkan.

7. Kejelasan

Penyajian anggaran harus sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

8. Diketahui Publik

Dokumen anggaran wajib diumumkan secara terbuka agar dapat diakses dan diketahui masyarakat luas.

## 2.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik memiliki beberapa peran pokok, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, instrumen kebijakan fiskal, alat politik, sarana koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, serta sarana motivasi (Rubenstein, 2002, Mardiasmo, 2002). Berikut penjelasannya yang telah diparafrasekan:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran menjadi pedoman manajemen dalam merancang langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Dokumen anggaran menunjukkan rencana pemerintah: kegiatan yang akan dilaksanakan, besarnya biaya, dan target hasil dari belanja public. Peran anggaran sebagai perencanaan meliputi:

- Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar selaras dengan visi dan misi organisasi.
- Menetapkan program dan kegiatan beserta alternatif sumber pendanaannya.
- Mengalokasikan dana sesuai prioritas program yang telah ditetapkan.
- Menentukan indikator kinerja dan tolok ukur keberhasilan strategi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran menghubungkan proses perencanaan dengan proses pengawasan. Rencana rinci pendapatan dan pengeluaran memungkinkan pemerintah mengendalikan pengeluaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pengendalian pemborosan tidak mungkin dilakukan. Bahkan, pejabat publik seperti presiden, menteri, gubernur, atau bupati dapat dikontrol melalui mekanisme anggaran karena eksekutif hanya dapat membelanjakan dana sesuai persetujuan.

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, anggaran dipakai untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan. Anggaran menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga memudahkan pembuatan proyeksi dan perkiraan ekonomi. Melalui belanja publik, pemerintah dapat menstimulasi, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Penyusunan anggaran melibatkan keputusan mengenai prioritas dan pembiayaan kebutuhan masyarakat. Di sektor publik, anggaran menjadi wujud kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan penggunaan dana publik. Karena itu, prosesnya menuntut keterampilan politik, kemampuan membangun koalisi, kecakapan bernegosiasi, serta pemahaman manajemen keuangan negara. Kegagalan mengeksekusi anggaran yang sudah disetujui dapat menurunkan kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination & Communication Tool*)

Dalam penyusunan anggaran, setiap unit kerja pemerintah terlibat. Dokumen anggaran berfungsi sebagai sarana koordinasi antarbagian, sekaligus mendeteksi potensi ketidaksinkronan rencana antarunit. Anggaran juga menjadi media komunikasi, karena rencana dan target harus disampaikan ke seluruh organisasi agar dapat dijalankan secara konsisten.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran mencerminkan komitmen eksekutif kepada legislatif. Pencapaian target anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan, baik dalam hal realisasi maupun efisiensi. Pejabat atau manajer publik dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka merealisasikan anggaran sesuai ketentuan.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat mendorong manajer dan pegawai bekerja secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai sasaran organisasi. Namun, target anggaran harus menantang tetapi tetap realistik: tidak terlalu tinggi sehingga sulit dicapai, dan tidak terlalu rendah sehingga kurang memacu kinerja.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Penganggaran sektor publik merupakan proses krusial dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Anggaran tidak hanya sekadar rencana penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal, politik, koordinasi, penilaian kinerja, dan motivasi bagi aparatur pemerintahan. Proses penyusunan anggaran memerlukan perencanaan yang matang, meliputi penetapan tujuan, prioritas program, serta pemilihan sumber pendanaan dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya, waktu, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Penyusunan anggaran sektor publik wajib berlandaskan prinsip-prinsip utama seperti otorisasi legislatif, komprehensivitas, keutuhan anggaran, ketepatan perkiraan, kejelasan, periodisasi, dan keterbukaan publik. Penerapan prinsip tersebut menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, anggaran sektor publik bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi sarana strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **3.2 SARAN**

Untuk meningkatkan kualitas penganggaran sektor publik, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan disarankan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Aparatur pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas manajemen keuangan dan pemahaman prinsip anggaran agar alokasi dana lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem e-budgeting dan pelaporan real-time penting diterapkan untuk meminimalkan penyimpangan, mempercepat proses, serta memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah.

## **STUDI KASUS**

Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Tujuannya adalah mengurangi beban Jakarta serta mendorong pemerataan pembangunan.

Namun, proyek ini menimbulkan perdebatan. Pertama, transparansi penggunaan anggaran dipertanyakan karena skema pembiayaan dari APBN, BUMN, swasta, hingga investasi asing belum sepenuhnya jelas. Kedua, muncul dilema antara prioritas anggaran: apakah dana besar lebih tepat dipakai untuk IKN atau untuk sektor mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, masih ada kritik mengenai minimnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan, padahal sesuai prinsip anggaran publik seharusnya bersifat terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan :

1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian bisa diterapkan agar proyek IKN tidak boros?
2. Jika Anda anggota legislatif, apakah akan menyetujui alokasi dana besar untuk IKN di tengah kebutuhan lain yang mendesak?

## **POST TEST**

1. Jelaskan mengapa anggaran sektor publik harus disusun berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat.
2. Uraikan perbedaan utama antara fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian dalam konteks sektor publik.
3. Sebutkan dan jelaskan tiga faktor yang dapat memengaruhi proses penyusunan anggaran sektor publik.
4. Mengapa persetujuan legislatif menjadi syarat penting sebelum anggaran pemerintah dapat digunakan? Berikan alasannya.
5. Bagaimana penerapan teknologi e-budgeting dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sektor publik?

## **DAFTAR PUSTAKA**

- HARYANTO, Haryanto. "Akuntansi Sektor Publik." *Akuntansi Sektor Publik* (2007): 1-251.
- Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Kusnadi, I. H. (2023). Bab 3 Anggaran Sektor Publik. *Teori Administrasi Publik*, 35.
- Mahsun, Moh, Firma Sulistyowati, and Heribertus Andre Purwanugraha. "Akuntansi sektor publik." *Yogyakarta: BPFE* (2011).